

Peran Media Massa dalam Mempengaruhi Eskalasi Konflik Sosial di Masyarakat

Nazwa Husna Effendy ^{1*}, Riski Hamonangan Sitepu ²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

*Penulis korespondensi : nazwahusna281@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of mass media in influencing the escalation of social conflict in society. Mass media, both conventional and digital, have significant power in shaping public opinion and influencing public perceptions of sensitive social issues. In the context of Indonesia's pluralistic society, non-objective and provocative reporting can accelerate the rise of social tensions and exacerbate intergroup conflict. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature review method, drawing on sources from various scientific journals, books, and previous research reports. The results indicate that media can act as both a trigger and a mitigator of conflict, depending on how information is presented to the public. Media that prioritizes the principles of peace journalism can help create cross-group communication, foster empathy, and strengthen social solidarity. Conversely, biased and sensational media can exacerbate differences and lead to social disintegration. Therefore, media practitioners require moral responsibility, professional ethics, and social awareness to ensure their function remains oriented toward truth, justice, and peace. Thus, mass media holds a strategic position in building social harmony amidst the diversity of Indonesian society.*

Keywords: *mass media, peace journalism, provocative objectives, social conflict, strategic position*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dalam memengaruhi eskalasi konflik sosial di masyarakat. Media massa, baik konvensional maupun digital, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu sosial yang sensitif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pemberitaan yang tidak objektif dan provokatif dapat mempercepat meningkatnya ketegangan sosial dan memperluas konflik antar kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media dapat berperan sebagai faktor pemicu maupun peredam konflik, tergantung pada bagaimana informasi disajikan kepada publik. Media yang mengedepankan prinsip jurnalisme damai mampu membantu menciptakan komunikasi lintas kelompok, menumbuhkan empati, dan memperkuat solidaritas sosial. Sebaliknya, media yang bias dan sensasional justru memperuncing perbedaan serta menimbulkan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab moral, etika profesional, dan kesadaran sosial dari para praktisi media agar fungsi media tetap berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, media massa memiliki posisi strategis dalam membangun keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kata kunci: jurnalisme damai, konflik sosial, media massa, objektif provokatif, posisi strategis

1. LATAR BELAKANG

Media massa merupakan salah satu elemen penting dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat modern. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan juga sebagai agen pembentuk opini publik, pembangun citra sosial, dan penentu arah persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya (Tähtinen, 2024). Dalam konteks kehidupan yang semakin terhubung secara digital, media massa baik media konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio, maupun media baru seperti portal berita daring, media sosial, dan platform digital memiliki kekuatan yang luar

biasa dalam membentuk wacana publik dan memengaruhi perilaku kolektif masyarakat. Namun, di balik fungsi informatif dan edukatifnya, media massa juga berpotensi menjadi faktor pemicu eskalasi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan prinsip tanggung jawab sosial, profesionalisme, dan objektivitas jurnalistik (Jayusman et al., 2019).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural, peran media massa menjadi semakin krusial. Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang kompleks (Kothur & Pandey, 2023). Kondisi ini menjadikan masyarakat Indonesia rentan terhadap gesekan sosial yang dapat berujung pada konflik apabila isu-isu yang sensitif, seperti perbedaan agama, suku, atau politik, diberitakan dengan cara yang provokatif, bias, atau tidak berimbang (Khansa Nabila & Asto Aji, 2024). Media yang seharusnya berfungsi sebagai perekat sosial (*social cohesion*) justru dapat berubah menjadi pemicu polarisasi dan perpecahan apabila pemberitaan dilakukan tanpa mempertimbangkan etika jurnalistik dan dampak sosialnya (Jayusman et al., 2019).

Fenomena penyebaran informasi di era digital memperkuat pengaruh media dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat dari yang semula bersifat satu arah menjadi interaktif dan partisipatif. Munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, TikTok, dan YouTube telah melahirkan ruang publik baru di mana setiap individu tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen informasi (*prosumer*). Situasi ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan (Hussain, 2020). Di satu sisi, keterbukaan informasi memperluas akses masyarakat terhadap berbagai perspektif. Namun di sisi lain, arus informasi yang tidak tersaring dan tidak terverifikasi dapat memunculkan disinformasi, misinformasi, dan hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial, bahkan memicu konflik horizontal antarwarga (Irfantoni et al., 2025).

Sejarah sosial-politik Indonesia mencatat berbagai peristiwa di mana media massa memainkan peran signifikan dalam mengeskalisasi maupun meredam konflik. Misalnya, pada masa reformasi 1998, media menjadi saluran utama dalam menyebarkan berita-berita mengenai kerusuhan sosial yang meluas di berbagai daerah (Ersoy & Miller, 2020). Pemberitaan yang tidak proporsional tentang isu-isu sensitif seperti etnis Tionghoa atau konflik antaragama di Ambon dan Poso turut memperkeruh suasana sosial. Media juga berperan dalam memperkuat solidaritas publik terhadap isu kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, serta mengawal reformasi sosial dan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media massa memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang dapat menjadi instrumen perdamaian, namun juga dapat berperan sebagai katalisator konflik (Jamhur Poti, 2011).

Dalam perspektif komunikasi massa, media memiliki kemampuan agenda-setting, yaitu kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Ketika media memilih untuk menyoroti isu tertentu secara berlebihan, masyarakat cenderung memandang isu tersebut sebagai sesuatu yang signifikan dan mendesak untuk diperhatikan (Carey, González, & Mitchell, 2023). Dalam konteks konflik sosial, efek agenda-setting dapat memperkuat persepsi ancaman dan ketegangan di masyarakat apabila pemberitaan dilakukan tanpa kehati-hatian. Misalnya, penggunaan diksi yang sensasional, pemilihan narasumber yang berpihak, atau framing berita yang menonjolkan aspek konflik ketimbang solusi dapat menciptakan spiral kebencian di antara kelompok sosial yang berbeda (Yuniarti, 2018).

Selain itu, teori framing dalam studi komunikasi menjelaskan bahwa cara media mengemas berita akan sangat menentukan bagaimana publik memahami suatu peristiwa. Ketika media menyoroti konflik sosial dari sudut pandang tertentu misalnya menampilkan satu kelompok sebagai pihak yang “benar” dan kelompok lain sebagai “salah” maka publik akan cenderung mengadopsi pandangan serupa. Dengan demikian, media tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga membingkai cara berpikir masyarakat tentang suatu realitas. Dalam kasus konflik sosial, framing yang tidak adil dan tidak objektif dapat memperkuat stereotip, memperdalam prasangka, dan memicu sentimen permusuhan (Wello Neger S et al., 2025).

Eskalasi konflik sosial sendiri dapat diartikan sebagai proses meningkatnya intensitas dan cakupan konflik di dalam masyarakat, baik dari segi jumlah pelaku, wilayah yang terdampak, maupun tingkat kekerasan yang terjadi. Media massa, dengan kekuatan penyebaran informasi yang masif, dapat mempercepat proses eskalasi tersebut melalui pemberitaan yang menimbulkan rasa takut, marah, atau terancam di kalangan masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik yang awalnya bersifat lokal dapat berkembang menjadi konflik nasional karena penyebaran narasi yang membakar emosi publik. Misalnya, konflik di suatu daerah dapat menjadi perhatian nasional ketika media memberitakannya secara berulang dengan nada emosional, tanpa memberikan konteks yang memadai (Amanah Nurish, 2019).

Namun demikian, tidak semua peran media bersifat negatif. Banyak penelitian dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa media juga memiliki potensi besar sebagai sarana resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Melalui pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan berbasis fakta, media dapat membantu masyarakat memahami akar masalah konflik, menumbuhkan empati antar kelompok, serta mendorong dialog konstruktif. Media dapat menjadi ruang komunikasi lintas identitas yang menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks akademik, kajian mengenai peran media massa dalam eskalasi konflik sosial menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama di era disrupsi

informasi seperti saat ini. Penelitian ini berusaha menelaah secara mendalam bagaimana media massa, baik dalam bentuk tradisional maupun digital, berkontribusi dalam mempercepat atau menghambat eskalasi konflik sosial di masyarakat. Analisis ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika hubungan antara media dan konflik, tetapi juga untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih etis dan konstruktif dalam menghadapi potensi disintegrasi sosial (M Rawa El Amady, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana peran media massa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika konflik sosial di Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya tanggung jawab sosial media dalam menjaga stabilitas sosial, serta bagaimana praktik jurnalisme damai dapat diimplementasikan sebagai strategi efektif dalam mencegah eskalasi konflik dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggambaran sistematis dan faktual mengenai peran media massa dalam memengaruhi eskalasi konflik sosial di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, serta dinamika interaksi sosial yang terjadi antara media dan publik secara kontekstual. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap realitas sosial yang kompleks melalui interpretasi yang mendalam, bukan sekadar pengukuran angka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan artikel media yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pola pemberitaan media dan dampaknya terhadap konflik sosial. Analisis data dilakukan secara interaktif, mengikuti langkah-langkah berikut yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rizal Safarudin et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Massa sebagai Pembentuk Opini Publik dalam Konflik Sosial

Media massa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membentuk pola pikir, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk konflik. Dalam ranah komunikasi massa, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi

juga sebagai pembentuk realitas sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami peristiwa di sekitarnya. Dalam konteks konflik sosial, media dapat memainkan peran ganda: di satu sisi sebagai penyebar informasi yang objektif, dan di sisi lain sebagai pihak yang dapat memperkeruh suasana melalui penyajian informasi yang tidak proporsional. Melalui fungsi agenda setting, media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting dan layak diperhatikan publik. Ketika media menyoroti suatu peristiwa konflik secara intensif, masyarakat akan memandang isu tersebut sebagai sesuatu yang signifikan dan mendesak untuk disikapi (Bangun, 2020).

Selain itu, media massa juga berperan dalam proses pembentukan opini publik melalui mekanisme framing atau pemingkanaan berita. Cara media mengemas dan menarasikan suatu peristiwa akan memengaruhi bagaimana khalayak menafsirkan dan merespons informasi tersebut. Misalnya, ketika konflik antar kelompok diberitakan dengan menonjolkan sisi kekerasan dan permusuhan, maka publik akan lebih mudah terbawa pada emosi negatif seperti marah, takut, atau curiga terhadap kelompok lain. Namun, apabila media memilih untuk mengangkat aspek-aspek dialog, perdamaian, dan upaya penyelesaian, maka dampak yang dihasilkan justru dapat menumbuhkan empati dan kesadaran bersama untuk mencari solusi damai. Dengan demikian, peran media sebagai pembentuk opini publik sangat menentukan arah perkembangan situasi sosial di masyarakat (M Rawa El Amady, 2022).

Media massa sering kali dijadikan rujukan utama oleh masyarakat dalam menilai suatu peristiwa sosial. Hal ini membuat media memiliki kekuatan untuk memengaruhi wacana publik secara luas. Dalam banyak kasus, pemberitaan media yang tidak berimbang dapat menciptakan persepsi yang salah terhadap kelompok tertentu dan memunculkan polarisasi sosial. Sebagai contoh, media yang memberikan porsi lebih besar pada satu kelompok dan mengabaikan kelompok lainnya akan menciptakan kesenjangan persepsi di masyarakat. Akibatnya, muncul rasa tidak percaya, saling curiga, dan perasaan ketidakadilan yang berpotensi memperuncing konflik. Oleh karena itu, media harus memainkan peran etisnya dengan menyajikan informasi secara adil, transparan, dan faktual agar mampu berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah konflik yang lebih besar (Amanah Nurish, 2019).

Dampak Pemberitaan Media terhadap Eskalasi Konflik Sosial

Dampak pemberitaan media terhadap konflik sosial sangat signifikan dan dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana media mengelola dan menyalurkan informasi kepada publik. Dalam banyak kasus di Indonesia, media massa berperan dalam mempercepat eskalasi konflik melalui penyajian berita yang sensasional, berlebihan, dan tidak berimbang. Pemberitaan yang demikian sering kali lebih menonjolkan sisi dramatik dan

emosional ketimbang substansi masalah yang sebenarnya. Penggunaan bahasa yang provokatif, gambar yang menimbulkan ketegangan, serta narasi yang menggiring opini masyarakat ke arah tertentu dapat memperkeruh suasana sosial dan meningkatkan potensi terjadinya benturan di lapangan (Wello Neger S et al., 2025).

Media yang memberitakan konflik tanpa memperhatikan etika jurnalistik secara tidak langsung dapat menyalakan “api” kebencian di tengah masyarakat. Misalnya, dalam konflik antar etnis atau agama, penggunaan istilah yang menstigmatisasi salah satu pihak dapat memperkuat stereotip negatif dan memperlebar jarak sosial antar kelompok. Dampak semacam ini bukan hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat memengaruhi hubungan sosial dalam jangka panjang karena menanamkan rasa permusuhan dan ketidakpercayaan. Bahkan, konflik yang awalnya hanya bersifat lokal dapat menjadi isu nasional apabila media menyebarluaskan narasi-narasi yang menimbulkan kegelisahan sosial secara berulang-ulang (Yuniarti, 2018).

Namun demikian, dampak media tidak selalu bersifat negatif. Media yang menjalankan fungsinya secara profesional justru mampu berperan sebagai instrumen perdamaian dan edukasi publik. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, media dapat membantu masyarakat memahami akar masalah konflik dan mencari solusi yang konstruktif. Media yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dapat berperan sebagai agen mediasi antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini, media tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan kerja sama lintas kelompok sosial. Oleh sebab itu, kualitas pemberitaan dan integritas media sangat menentukan apakah media akan menjadi pemicu atau peredam konflik sosial di masyarakat.

Strategi Jurnalisme Damai sebagai Upaya Meredam Konflik Sosial

Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam mencegah dan meredam konflik sosial adalah penerapan konsep jurnalisme damai (peace journalism). Konsep ini menekankan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya melaporkan fakta konflik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dengan cara menyajikan informasi yang menekankan solusi, dialog, dan rekonsiliasi. Jurnalisme damai menghindari penggunaan bahasa yang menghasut, menyalahkan, atau menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, pendekatan ini berfokus pada upaya memahami latar belakang konflik, menonjolkan suara korban, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan perspektifnya secara setara (Jayusman et al., 2019).

Dalam praktiknya, jurnalisme damai dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, seperti: menampilkan konteks peristiwa secara menyeluruh, menghindari generalisasi kelompok, serta tidak mengedepankan aspek kekerasan sebagai daya tarik utama berita (Khansa Nabila & Asto

Aji, 2024). Jurnalis perlu menggali akar masalah yang melatarbelakangi konflik, seperti ketimpangan sosial, ekonomi, atau politik, agar masyarakat memahami bahwa konflik bukan semata-mata persoalan permusuhan personal, melainkan akibat dari struktur sosial yang kompleks. Dengan cara ini, media berperan dalam mengedukasi masyarakat dan membantu menciptakan ruang dialog yang sehat antar kelompok yang berbeda (Amanah Nurish, 2019).

Selain itu, media perlu memperkuat kapasitas etika dan profesionalisme jurnalis agar mereka mampu menulis berita dengan perspektif damai. Lembaga pers, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pelatihan tentang jurnalisisme damai dan tanggung jawab sosial media. Di era digital seperti sekarang, penting pula bagi media daring dan media sosial untuk menerapkan kebijakan verifikasi informasi secara ketat guna mencegah penyebaran berita palsu dan provokatif (Bangun, 2020).

Dengan demikian, penerapan jurnalisisme damai menjadi langkah strategis bagi media dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui pemberitaan yang etis, berimbang, dan berorientasi pada perdamaian, media massa dapat memainkan peran positif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan bebas dari konflik sosial yang merusak tatanan kehidupan bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik sekaligus memengaruhi dinamika konflik sosial di masyarakat. Sebagai sumber utama informasi, media dapat menjadi sarana edukasi yang mencerdaskan, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial apabila pemberitaannya tidak berimbang dan mengandung unsur provokatif. Pemberitaan yang menonjolkan kekerasan, kebencian, atau stereotip terhadap kelompok tertentu dapat mempercepat eskalasi konflik dan memperlebar jarak sosial antarwarga. Sebaliknya, media yang menjalankan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab sosial dapat menjadi alat pemersatu bangsa melalui penyajian informasi yang objektif, menenangkan, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perdamaian. Penerapan jurnalisisme damai menjadi solusi strategis agar media berperan sebagai agen penyebar nilai-nilai toleransi, dialog, dan rekonsiliasi. Dengan menjaga etika, akurasi, serta keberimbangan dalam setiap pemberitaan, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai fakta, tetapi juga sebagai pendorong terbentuknya tatanan masyarakat yang harmonis, kritis, dan beradab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan jurnal ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Amanah, N. (2019). Dari fanatisme ke ekstremisme: Ilusi, kecemasan, dan tindakan kekerasan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 21(1), 31-41. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>
- Bangun, E. (2020). Peran media massa dalam pembentukan identitas nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Human Narratives*, 1(2), 103-112. <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.354> <https://doi.org/10.30998/hn.v1i2.354>
- Carey, S. C., González, B., & Mitchell, N. J. (2023). Media freedom and the escalation of state violence. *Political Studies*, 71(2), 440-462. <https://doi.org/10.1177/00323217211020243> <https://doi.org/10.1177/00323217211020243>
- Ersoy, M., & Miller, L. M. (2020). Peace journalism strategy for creating a public value sphere. *International Peacekeeping*, 27(3), 395-416. <https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1740058> <https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1740058>
- Hussain, S. (2020). Peace journalism for conflict reporting: Insights from Pakistan. *Journalism Practice*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1596753> <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1596753>
- Irfantoni, Delmiati, S., & Yuspar. (2025). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 21-29. <https://doi.org/10.31933/jcxcfg64> <https://doi.org/10.31933/jcxcfg64>
- Jamhur, P. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 16-29.
- Jayusman, Syarifuddin, & Khalifatul Syuhada. (2019). Faktor dan upaya resolusi konflik sosial (Kasus Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Waja Kabupaten Dompu). *Resiprokal*, 1(2), 135-152. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i2.13>
- Khansa Nabila, M., & Asto Aji, D. (2024). Analisis framing media online CNNIndonesia.com dan Kompas.com terhadap konflik agraria di Pulau Rempang. *Indonesian Journal of Society Studies*, 4(2), 208-223. <https://doi.org/10.21009/Saskara.042.02>
- Kothur, L., & Pandey, V. (2023). Role of social media news consumption in cultivating opinion polarization. *Information Technology & People*, 38(2), 757-786. <https://doi.org/10.1108/ITP-12-2022-0942> <https://doi.org/10.1108/ITP-12-2022-0942>

- M Rawa El Amady. (2022). Peran media daring pada konflik sumber daya alam di Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 181-196. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i2.3692>
- Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, & Nana Sepriyanti. (2023). Penelitian kualitatif. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Tähtinen, T. (2024). When Facebook is the internet: The role of social media in ethnic conflict. *World Development*, 180, Article 106633. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106633>
- Wello Neger, S., Rachmat Setiawibawa, Syawal Fahmi, & Arifuddin Uksan. (2025). Konflik sosial sebagai ancaman non-militer: Perspektif keamanan nasional Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3667-3680. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Yuniarti. (2018). Upaya penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur (Studi kasus: Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur). *Jurnal Paradigma*, 7(3), 165-179.